

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis, Tahun dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|---|
| 1. | Mutiara Irma Tungga Dewi (2018) dengan judul Difusi Inovasi Pupuk Organik Kotoran Gajah Untuk Pertanian (studi deskriptif kualitatif pada Usaha Kecil Menengah Poktan Mekar Sari, Dusun Jowahan, Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang). | Hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa usaha kecil menengah Poktan Mekar Sari dapat membuat inovasi produksi pupuk untuk pertanian dari kotoran gajah, yaitu produk pupuk organik kotoran gajah. UKM Poktan Mekar Sari menggunakan komponen difusi inovasi yaitu tahap awal sebagai poses bagaimana pupuk organik kotoran gajah dapat diproduksi dan didukung oleh masyarakat dan pemerintah kota Magelang. |
| 2. | Muhammad Ibrahim Kholilulloh (2013) dengan judul Kapabilitas Inovasi Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam Program Pertanian Terpadu Tepat Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam program pertanian terpadu dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dimensi-dimensi dan faktor pendorong (<i>enablers</i>) kapabilitas inovasi yang mempengaruhi keberhasilan beberapa inovasi yang diciptakan dan dijalankan oleh Dinas Pertanian kabupaten Jombang. Dari kapabilitas yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Jombang dalam melakukan inovasi tersebut, dapat dirasakan oleh petani adanya manfaat dari sebelum dan |

| | | |
|----|---|---|
| | | sesudah diterapkan inovasi-inovasi tersebut. |
| 3. | Juliantika (2018) Persepsi Petani Terhadap Sistem Pertanian Organik dan Anorganik Dalam Budidaya Padi Sawah (Kasus petani padi di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu). | Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi petani terhadap usaha tani padi organik dan anorganik cukup baik, termasuk dalam klasifikasi tinggi. Kendala-kendala yang dihadapi petani dalam penerapan sistem pertanian organik yaitu sulitnya perawatan dalam budidaya padi sawah organik, sedangkan kendala yang dihadapi petani dalam penerapan sistem pertanian anorganik yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan, dan harga jual yang rendah. |
| 4. | Ermayani Sholikhah (2018) Faktor-Faktor Penentu Adopsi Inovasi Pertanian Organik (Studi Kasus Petani Bawang Merah Pelaksana Program Kawasan Pertanian Organik di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu). | Penentu adopsi Inovasi pertanian organik adalah: karakteristik petani (umur petani, tingkat pendidikan petani, luas lahan) tidak menentukan adopsi inovasi tetapi mempengaruhi persepsi petani terhadap inovasi. Faktor yang lebih menentukan karena bantuan modal berupa input budidaya pertanian organik. Persepsi petani terhadap karakteristik inovasi yang menentukan adopsi inovasi adalah keuntungan relatif inovasi, kesesuaian dengan nilai dan kondisi lahan petani, kemudahan inovasi diuji coba dalam luasan kecil dan kemudahan untuk diamati. |
| 5 | Kusumo, dkk (2017) Persepsi Petani Terhadap Teknologi Budidaya Sayuran Organik di Kabupaten Bandung Barat. | Hasil analisis menunjukkan bahwa petani memiliki persepsi yang positif terhadap keuntungan membudidayakan sayuran organik, kesesuaian teknologi budidaya dengan kelestarian lingkungan, kemudahan dalam pelaksanaan budidaya sayuran organik, kemudahan mendapatkan informasi teknis budidaya. |

Sumber : Olahan Penulis

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik yaitu “pemberian jasa, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.” Santosa, (Administrasi Publik; hal 57)

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

H.A.S. Moenir (2002:7) mengatakan pelayanan umum adalah ” suatu usaha yang dilakukan kelompok orang atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”

Sinambela (2006:42-43) menyimpulkan “pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sesuai dengan hak-hak setiap warga negara atas suatu barang, dan jasa.

Menurut AG.Subarsono (2005) dalam Agus Dwiyanto (2005:141) pelayanan publik didefinisikan sebagai “ serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 4)

Pelayanan publik menurut Wasistiono (Hardiyansyah 2011 : 11) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Prasajo (2006:6) pelayanan publik adalah suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan.

Dari berbagai pengertian pelayanan dan pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

2.2.2 Inovasi

Menurut Helmi dan Sutarmanto (2004) dalam Ulum M. Chaziend (2014:80), Inovasi adalah Proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif, apa yang dianggap baru oleh seseorang bisa jadi merupakan sesuatu yang lama bagi orang lain dalam konteks yang lain. Sedangkan menurut Ancok (2015) memberikan defenisi inovasi sebagai “ suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk baru, jasa, cara baru, kebijakan dan sebagainya.

Inovasi menurut Evert M. Rogers dalam Ilham (2016:6) adalah sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diiterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi sendiri didefenisikan secara singkat oleh Elitan dan Anatan (2009/36) dalam Ilham (2016:6) sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwasanya inovasi merupakan suatu bentuk pembaharuan yang berupa jasa maupun produk yang nantinya memiliki suatu nilai yang bermanfaat. Dalam penerapannya inovasi memiliki atribut yang melekat didalam inovasi tersebut. Atribut inovasi yang dimaksud menurut Everett M. Roggers (2003) dalam Suwarno (2008:17) antara lain sebagai berikut :

1. *Relative Advantage* atau keuntungan relatif, sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang terletak dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
2. *Complexity* atau kerumitan, dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena

sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

3. *Triability* atau Kemungkinan dicoba, inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji coba” dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.
4. *Observability* atau kemudahan diamati, sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

2.2.3 Inovasi Pelayanan Publik

Secara umum inovasi seringkali diterjemahkan sebagai penemuan baru. Namun sebenarnya aspek “kebaruan” dalam inovasi sangat ditekankan untuk inovasi di sektor swasta atau di sektor industri. Sedangkan, inovasi di sektor publik lebih ditekankan pada aspek “perbaikan” yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas, murah dan terjangkau (Wijayanti, 2008) dalam Ilham (2016:11).

Menurut Currie dkk.(2008) dalam Ilham (2016:11), Inovasi dalam konteks sektor publik didefinisikan sebagai “penciptaan, dan pelaksanaan proses, produk, jasa, dan metode pengiriman yang menghasilkan perbaikan. Inovasi dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai pembaharuan ciptaan, kreativitas, ciptaan baru dalam pelayanan publik (Setijaningrum, 2009:83).

Dalam konteks pelayanan publik, inovasi menurut Moenir dalam Kurniawan (2005 : 7) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Mulgan & Albury dalam Muluk (2008: 44-45) inovasi pelayanan publik dikatakan berhasil jika merupakan hasil kreasi dan implementasi dari inovasi produk layanan, inovasi proses pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem.

Inovasi pada sektor publik ini bukanlah suatu ide, gagasan maupun temuan yang baru, namun lebih tepatnya inovasi dalam sektor publik didefinisikan

sebagai suatu pembaharuan pada suatu inovasi sebelumnya yang menjadikan inovasi tersebut menjadi layak dan tepat guna. Adakalanya, terdapat faktor penghambat pada suatu inovasi. Hal inilah yang menjadikan apakah inovasi tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak, atau ada suatu pembaruan dalam inovasi tersebut. Agar nantinya pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dan diterima dengan baik oleh masyarakat serta menguntungkan rakyat.

2.2.4 Go-Organik

Go-organik merupakan suatu inovasi yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada untuk mengajak semua masyarakat daerah kembali ke pertanian organik, guna meyelamtkan organisme tanah, meningkatkan produktivitas dan menjamin produknya sehat untuk dikonsumsi. Salah satu wujud nyata dari inovasi Go-Organik adalah program pembuatan pupuk organik, yang merupakan gerakan dasar dalam proses inovasi Go-Organik tersebut.

2.2.5 Pertanian Organik

Pertanian Organik merupakan sistem pertanian yang bertujuan untuk tetap menjaga keselarasan (harmoni) dengan sistem alami, dengan memanfaatkan dan mengembangkan semaksimal mungkin proses-proses alami dalam pengelolaan usaha tani (Kasumbogo Untung, 1997). Pertanian Organik merupakan pertanian dengan berdasarkan pada prinsip alam atau kembali ke alam. Pertanian Organik dapat diartikan sebagai sistem pertanian secara alami yang menggunakan pupuk organik dari alam dan sedikit melakukan pengolahan tanah, (Bahar,2007). Sedangkan menurut Rifa'I (2003) pertanian organik adalah cara-cara atau sistem budidaya pertanian yang menghindarkan penggunaan pupuk ataupun pestisida buatan pabrik.

Pertanian Organik bertujuan menghindarkan bahan kimia dan pupuk yang bersifat meracuni lingkungan agar mempunyai kondisi lingkungan yang sehat. Pertanian Organik berusaha menghasilkan produksi tanaman berkelanjutan dengan cara memperbaiki kesuburan tanah menggunakan sumber daya alami seperti mendaur ulang limbah pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia buatan; mewujudkan sikap dan perilaku hidup yang menghargai alam; dan berkeyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah Tuhan yang harus dilestarikan (Joko Prayogo dkk, 1999).

2.2.6 Pupuk Organik

Pupuk organik pupuk yang berasal dari sisa tanaman, hewan, atau seperti pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos baik yang berbentuk cair atau padat

(Diah Setyorini, 2005). Pupuk Organik adalah bahan organik yang umumnya berasal dari tumbuhan atau hewan, ditambahkan ke dalam tanah secara spesifik sebagai sumber hara (Sutanto,2003).

Peraturan Menteri Pertanian No 28/Permentan/SR.130/5/2009 menyatakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral alami atau mikroba yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mempunyai kandungan unsur, terutama Nitrogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K) sangat sedikit, tetapi mempunyai peranan lain yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan tanaman (Suriawiria,2003).

2.2.7 Hortikultura

Secara harafiah, hortikultura berarti ilmu yang mempelajari pembudidayaan tanaman kebun. Akan tetapi pada umumnya para pakar mendefinisikan hortikultura sebagai ilmu yang mempelajari budi daya tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hortikultura adalah seluk-beluk kegiatan atau seni bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias. Menurut PERHORTI (2004) hortikultura adalah gabungan ilmu, seni, dan teknologi dalam mengelola tanaman sayuran, buah, ornamen, bumbu-bumbu, dan tanaman obat-obatan.

Tanaman Hortikutura tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki potensi pasar yang tinggi juga baik itu pasar dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini sudah sedemikian majunya, namun perkembangan bidang hortikultura tetap tergantung pada tingkat pendidikan, pengetahuan, serta pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap hortikultura

2.2.8 Kerangka Dasar Pemikiran

